



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YULIADI PURAWIBAWA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENILAIAN
3. NHK : 113393

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.900.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/54 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/66 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 74 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 38.000.000

1. MOTOR, HONDA ADV 160CC Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 67.576.233

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.005.576.233

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.005.576.233

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **AHMAD FANANIE**
2. Jabatan : **PELELANG AHLI MADYA KPKNL BEKASI**
3. NHK : **137372**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.935.000.000**

1. Tanah Seluas 2.100 m2 di KAB / KOTA CIREBON, Rp. 84.000.000
2. Tanah Seluas 1.320 m2 di KAB / KOTA CIREBON, Rp. 27.000.000
3. Tanah Seluas 8.560 m2 di KAB / KOTA CIREBON, Rp. 102.000.000
4. Tanah Seluas 2.576 m2 di KAB / KOTA CIREBON, Rp. 32.000.000
5. Tanah Seluas 4.839 m2 di KAB / KOTA CIREBON, Rp. 82.000.000
6. Tanah Seluas 2.680 m2 di KAB / KOTA CIREBON, Rp. 32.000.000
7. Tanah Seluas 5.164 m2 di KAB / KOTA CIREBON, Rp. 76.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 675 m2/72 m2 di KAB / KOTA CIREBON, Rp. 900.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/90 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/180 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 22.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA N MAX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 15.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	94.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.066.000.000
III. HUTANG	Rp.	1.100.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.966.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.